

## **BAB V**

### **REFLEKSI DAN PENUTUP**

#### **5.1 Refleksi**

##### **5.1.1 Dari Kode Etik Pendeta Menuju Budaya Etis Gereja: Tanggung Jawab Bersama dalam Menjaga Integritas Pelayanan**

Sebagai pedoman moral bagi pendeta dalam menjalankan panggilan pelayanannya, kode etik memiliki peranan yang penting dalam pelayanan gereja. Meski demikian, kode etik tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pendeta. Sebab, kode etik juga merupakan sarana pembentukan kehidupan seorang pelayan. Dengan tujuan agar pendeta semakin mencerminkan karakter Kristus. Oleh karena itu, masalah utama kode etik bukan hanya soal ketaatan terhadap aturan, tetapi bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk karakter, relasi, dan budaya pelayanan gereja.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Gula yang menegaskan bahwa pusat dari etika pastoral bukan hanya mengenai “*apa yang harus dilakukan?*”, tetapi juga “*pribadi seperti apakah seorang pelayan dipanggil untuk menjadi?*”<sup>1</sup>. Artinya, kehidupan moral seorang pendeta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan eksternal, melainkan oleh pembentukan karakter, nilai hidup, dan identitas dirinya sebagai

---

<sup>1</sup> Richard M. Gula, *Etika Pastoral Dilengkapi Dengan Kode Etik*, vol. 10.

pelayan Allah. Kode etik tidak bertujuan menghasilkan pendeta yang sekadar takut melakukan pelanggaran, tetapi membentuk pribadi yang mampu bertindak dengan kasih, kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab pastoral.

Hal ini sejalan dengan Kode Etik Pendeta GMIT yang menegaskan bahwa integritas pendeta terbentuk melalui tiga unsur penting, yaitu karakter (*virtue*), nilai hidup (*value*), dan visi moral (*vision*). Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa integritas bukan sesuatu yang otomatis dimiliki seseorang karena jabatan pendeta, tetapi harus terus dibentuk dalam perjalanan pelayanan<sup>2</sup>. Seorang pendeta tidak hanya dipanggil menjadi pemimpin organisasi, tetapi juga menjadi pribadi yang kehidupannya menjadi kesaksian tentang Kristus. Tetapi, hasil penelitian di Jemaat Siloam Oebelo Kecil menunjukkan bahwa persoalan implementasi kode etik tidak hanya berkaitan dengan pribadi pendeta. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kode etik dipahami dan dihidupi oleh seluruh komunitas gereja. Pendeta dapat memahami kode etik sebagai dasar untuk membangun keteraturan pelayanan melalui pembenahan administrasi, sistem organisasi, dan tata kelola gereja. Usaha tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Ronda menegaskan bahwa seorang gembala memang memiliki tugas dalam kepemimpinan dan organisasi. Akan tetapi, tugas tersebut harus selalu ditempatkan dalam identitas utama seorang

---

<sup>2</sup> Majelis Sinode GMIT, *Peraturan Disiplin Pejabat Dan Karyawan GMIT Tahun 2003 (Perubahan Pertama) Dan Kode Etik Pendeta GMIT Tahun 2020*.

gembala sebagai pemimpin rohani yang melayani, mendengar, dan membangun kehidupan umat<sup>3</sup>.

Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada upaya menata keteraturan, melainkan bagaimana keteraturan tersebut diwujudkan melalui pendekatan pastoral. Dalam konteks jemaat yang kuat dengan budaya kekeluargaan, perubahan yang dilakukan tanpa komunikasi dan pengenalan terhadap kehidupan jemaat dapat diterima sebagai tindakan yang kurang menghargai relasi. Seorang pemimpin pastoral tidak hanya dipanggil melakukan sesuatu yang benar, tetapi juga melakukannya dengan cara yang bijaksana. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kode etik tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pendeta. Majelis, jemaat, tokoh jemaat, masyarakat, klasis, dan sinode juga memiliki peranan dalam membentuk kehidupan pelayanan. Sebagian jemaat memang tidak memahami kode etik sebagai dokumen resmi gereja. Namun, mereka memiliki pemahaman etis yang terbentuk melalui pengalaman bersama pendeta. Bagi mereka, pendeta yang berintegritas adalah pendeta yang hadir, mendengar, merangkul, dan menunjukkan keteladanan hidup.

Pemahaman tersebut memiliki nilai positif karena menegaskan aspek relasional dari pelayanan. Akan tetapi, apabila tidak disertai pemahaman yang benar tentang tugas dan kewenangan pendeta, maka dapat muncul tuntutan yang tidak seimbang. Dalam konteks tertentu,

---

<sup>3</sup> Daniel Ronda, *Gembala Sebagai Pemimpin Rohani*.

pengaruh sosial, hubungan keluarga, maupun posisi sebagai tokoh jemaat dapat ikut memengaruhi cara seseorang melihat pelayanan. Orang-orang yang memiliki sejarah panjang dalam membangun gereja dapat merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap jemaat. Namun, tanpa pemahaman eklesiologis yang benar, tanggung jawab tersebut dapat berubah menjadi keinginan untuk mempertahankan pengaruh dalam pengambilan keputusan gereja.

Oleh karena itu, persoalan kode etik sebenarnya bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga persoalan budaya gereja. Budaya organisasi merupakan sistem nilai, keyakinan, dan pola perilaku bersama yang membentuk cara anggota organisasi berpikir dan bertindak<sup>4</sup>. Dalam konteks gereja, budaya organisasi berarti nilai yang membentuk cara pendeta, majelis, jemaat, klasis, dan sinode menjalankan kehidupan bergereja. Budaya gereja yang sehat akan melahirkan keterbukaan, penghargaan, dan tanggung jawab bersama. Sebaliknya, budaya yang tidak sehat dapat membuat aturan kehilangan makna pastoralnya. Dengan demikian, kode etik bukan hanya alat untuk mengawasi kehidupan pendeta. Tetapi sekaligus menjadi cermin bagi gereja sebagai lembaga untuk mengevaluasi cara menjalankan tanggung jawab dan menggunakan otoritasnya. Integritas gereja tidak hanya ditentukan oleh kesetiaan pendeta terhadap aturan, tetapi juga oleh kesediaan seluruh struktur gereja untuk hidup berdasarkan nilai

---

<sup>4</sup> Lysda Hartaty Huwae, Beni Chandra Purba, Budi Kelana, "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Manajemen Gereja," *Juitak: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 4 (2023): 54–68.

yang sama. Majelis, jemaat, klasis, dan sinode bukan hanya menjadi pengawas kode etik, tetapi bagian dari komunitas moral yang juga perlu terus dikoreksi dan diperbarui.

Dari sini penelitian ini memperluas pemikiran Gula. Di mana integritas pelayanan tidak hanya berbicara tentang karakter moral seorang pendeta, tetapi juga karakter moral gereja sebagai sebuah komunitas. Gereja tidak cukup hanya memiliki pendeta yang berintegritas apabila budaya pelayanan di sekitarnya tidak mendukung nilai kasih, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Sebaliknya, budaya gereja yang sehat akan menolong setiap pelayan terus bertumbuh dalam panggilannya. Integritas pelayanan juga membutuhkan kesediaan seorang pemimpin untuk terus membentuk diri. Retnowati menjelaskan bahwa sebelum seseorang memimpin orang lain, ia harus mampu mengenal dan memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Pengenalan diri membuat seorang pemimpin mampu menyadari keterbatasan, menerima koreksi, dan melayani dengan rendah hati<sup>5</sup>. Pemimpin yang berintegritas bukanlah pemimpin yang tidak pernah salah, tetapi pemimpin yang bersedia terus diperbarui dalam panggilannya.

Dengan demikian, refleksi terhadap implementasi Kode Etik Pendeta GMIT mengajak gereja bergerak dari kode etik sebagai aturan menuju budaya etis gereja. Inilah panggilan gereja sebagai tubuh

---

<sup>5</sup> Retnowati, *Kepemimpinan Transformatif Menuju Kepemimpinan Baru Gereja*, 1st ed. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2016).

Kristus sebagaimana digambarkan Paulus dalam 1 Korintus 12:12-27. Gereja terdiri dari banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling membutuhkan. Ketika satu anggota terluka, seluruh tubuh turut merasakan dampaknya. Karena itu, menjaga integritas pelayanan bukan hanya tugas pendeta, tetapi panggilan bersama seluruh tubuh Kristus.

Sebagaimana ditegaskan Trull dan Carter, keberhasilan kode etik tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen tertulis, tetapi pada proses penyebaran, pendidikan, dan komitmen organisasi untuk menghidupinya<sup>6</sup>. Oleh karena itu, GMIT tidak hanya membutuhkan pendeta yang memahami kode etik, tetapi membutuhkan budaya gereja yang etis. Budaya tersebut memungkinkan pendeta, majelis, jemaat, klasis, dan sinode berjalan bersama dalam kasih, saling mengoreksi, dan menjaga integritas pelayanan sebagai kesaksian kepada dunia.

### **5.1.2 Dari Otoritas Menuju Pemulihan: Kuasa Pastoral sebagai Pelayanan yang Menyembuhkan**

Masalah penyalahgunaan otoritas dalam kepemimpinan pastoral tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaan, tetapi juga bagaimana gereja memahami makna kuasa itu sendiri. Dalam pelayanan pastoral, kuasa bukan diberikan untuk meninggikan posisi seseorang, melainkan sebagai

---

<sup>6</sup> Joe E. Trull, James E. Carter, *Etika Pelayan Gereja Peran Moral Dan Tanggung Jawab Etis Pelayan Gereja*.

kepercayaan untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan pemulihan bagi umat Allah. Oleh karena itu, refleksi terhadap implementasi Kode Etik Pendeta GMIT tidak cukup hanya diarahkan pada pertanyaan apakah seorang pendeta melanggar aturan atau tidak, tetapi juga bagaimana seluruh kehidupan bergereja membangun budaya penggunaan kuasa yang sesuai dengan teladan Kristus.

Richard Gula menjelaskan bahwa pelayanan pastoral selalu mengandung unsur kuasa karena seorang pelayan memiliki otoritas, pengetahuan, kedudukan, dan kepercayaan yang diberikan oleh komunitas kepadanya. Akan tetapi, kuasa tersebut harus dipahami sebagai tanggung jawab moral, bukan sebagai hak untuk mengontrol orang lain. Ketika seorang pemimpin gagal menyadari batas dan tanggung jawab kuasa yang dimiliki, maka relasi pastoral yang seharusnya membangun dapat berubah menjadi relasi yang melukai<sup>7</sup>. Dalam hal ini, kode etik hadir bukan sekadar sebagai batasan formal bagi pendeta, tetapi sebagai pengingat bahwa kuasa pelayanan harus selalu diarahkan kepada kebaikan orang lain.

Hal ini sejalan dengan pengajaran Yesus dalam Markus 10:42-45. Saat para murid memahami kuasa berdasarkan pola dunia yang menempatkan pemimpin sebagai pihak yang memerintah dan menguasai, Yesus menghadirkan cara pandang yang berbeda. Ia berkata: *“Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah*

---

<sup>7</sup> Richard M. Gula, *Etika Pastoral Dilengkapi Dengan Kode Etik*, vol. 10.

*ia menjadi pelayanmu.*” Melalui perkataan tersebut, Yesus tidak menolak adanya otoritas dalam kepemimpinan, tetapi mengubah makna otoritas itu. Otoritas dalam Kerajaan Allah tidak dinyatakan melalui dominasi, melainkan melalui kesediaan untuk melayani. Puncak kepemimpinan Yesus terlihat ketika Ia memberikan diri-Nya bagi kehidupan banyak orang. Dengan demikian, kepemimpinan pastoral bukan pertama-tama tentang kemampuan mengatur, tetapi kemampuan menghadirkan kehidupan.

Ronda menegaskan bahwa seorang gembala adalah pemimpin rohani, bukan penguasa. Pemimpin yang bermental penguasa cenderung memakai aturan sebagai alat untuk mempertahankan posisi, sedangkan pemimpin rohani menggunakan aturan sebagai pagar untuk menjaga dan melindungi kehidupan bersama<sup>8</sup>. Hal ini tidak berarti bahwa seorang pemimpin gereja tidak boleh mengambil keputusan atau menegakkan aturan. Sebaliknya, organisasi dan aturan tetap diperlukan dalam kehidupan gereja. Namun, pelaksanaan aturan harus selalu dibungkus dengan kasih pastoral sehingga tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu membangun tubuh Kristus.

Dalam konteks Jemaat Siloam Oebelo Kecil, konflik yang terjadi memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan benar dan salah semata. Pada satu sisi, pendeta sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>8</sup> Daniel Ronda, *Gembala Sebagai Pemimpin Rohani*.

menggunakan otoritasnya secara bijaksana, terbuka terhadap masukan, serta membangun komunikasi dengan jemaat dan majelis. Namun di sisi lain, jemaat juga perlu memahami bahwa pendeta bukanlah figur yang sempurna tanpa keterbatasan. Ronda mengingatkan bahwa jemaat sering kali memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap gembala, seolah-olah mencari figur tanpa kelemahan. Padahal, gembala juga manusia yang membutuhkan dukungan, koreksi, dan ruang untuk bertumbuh<sup>9</sup>. Karena itu, persoalan penyalahgunaan otoritas perlu dilihat bukan hanya sebagai kegagalan individu, tetapi juga sebagai panggilan bagi gereja untuk membangun budaya pemulihan. Wuellner menegaskan bahwa pemimpin gereja juga dapat membawa luka dalam dirinya. Luka yang tidak disadari dan tidak mengalami penyembuhan dapat memengaruhi cara seseorang berelasi, mengambil keputusan, dan menggunakan kuasa. Karena itu, gereja tidak cukup hanya menuntut pemimpin untuk melayani, tetapi juga perlu menyediakan ruang agar pemimpin mengalami pemulihan dan pembaruan<sup>10</sup>.

Tetapi, pemahaman terhadap pemimpin yang terluka bukan berarti membenarkan setiap tindakan yang keliru. Wuellner dengan jelas menegaskan bahwa kesalahan yang merusak kehidupan dan kepercayaan orang lain tetap harus dihentikan. Akan tetapi, tugas gereja tidak selesai hanya dengan menghentikan atau memberikan hukuman kepada pelaku. Jika gereja sungguh mengikuti hati Kristus sebagai Sang

---

<sup>9</sup> Daniel Ronda, *Gembala Sebagai Pemimpin Rohani*.

<sup>10</sup> Flora Slosson Wuellner, *Gembalakanlah Gembala-Gembalaku Penyembuhan Dan Pembaharuan Spiritual Bagi Para Pemimpin Kristen*, 7th ed. (PT. BPK Gunung Mulia, 2016).

Penyembuh, maka baik pihak yang terluka maupun pihak yang melukai membutuhkan proses penyembuhan<sup>11</sup>. Di sinilah gereja dipanggil untuk tidak hanya menjadi lembaga disiplin, tetapi komunitas pemulihan.

Pemahaman tersebut sejalan dengan semangat Tata Gereja GMIT, khususnya Pasal 85, yang melihat tindakan penggembalaan dan disiplin gerejawi bukan sebagai penghukuman semata, tetapi sebagai upaya membawa pertobatan, pembaruan hidup, serta pemulihan relasi<sup>12</sup>. Dengan demikian, peran klasis dan sinode tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif atau mengambil keputusan terhadap persoalan pendeta, tetapi juga menjalankan fungsi pastoral: mendampingi, membina, mengawasi, dan membuka ruang rekonsiliasi bagi seluruh pihak yang terluka.

Dengan demikian, maka refleksi terhadap kasus Jemaat Siloam Oebelo Kecil menunjukkan bahwa implementasi Kode Etik Pendeta GMIT perlu bergerak dari sekadar penegakan aturan menuju pembentukan budaya pastoral yang menyembuhkan. Gereja yang sehat bukanlah gereja tanpa konflik, melainkan gereja yang mampu menghadapi konflik secara dewasa melalui kebenaran, kasih, dan pemulihan. Pendeta, majelis, jemaat, klasis, maupun sinode sebagai bagian dari tubuh Kristus dipanggil untuk saling menjaga, mengoreksi, dan memulihkan. Sebab kuasa yang dipercayakan Allah kepada gereja

---

<sup>11</sup> Flora Slosson Wuellner, *Gembalakanlah Gembala-Gembalaku Penyembuhan Dan Pembaharuan Spiritual Bagi Para Pemimpin Kristen*.

<sup>12</sup> Majelis sinode GMIT, *Peraturan Pokok Jabatan Dan Karyawan Gereja Masehi Injili Di Timor*.

bukanlah kuasa untuk menguasai, melainkan kuasa untuk menghadirkan kehidupan sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu melayani dan memberikan diri-Nya bagi dunia.

### **5.1.3 Pendekatan Budaya dalam Kepemimpinan Pastoral**

Hasil penelitian di GMIT Jemaat Siloam Oebelo Kecil menunjukkan bahwa pelayanan pendeta tidak berlangsung dalam ruang yang kosong. Pelayanan berlangsung di tengah jemaat yang memiliki sejarah, kebiasaan, pola hubungan, struktur sosial, serta harapan tertentu terhadap seorang pendeta. Karena itu, kepemimpinan pastoral tidak cukup hanya bertumpu pada pengetahuan teologi, aturan gereja, kemampuan organisasi, dan kewenangan jabatan. Seorang pendeta juga perlu memahami konteks sosial dan budaya jemaat yang dilayaninya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa memang pendeta sedang melakukan berbagai pembenahan organisasi, dan administrasi. Penataan tersebut membawa perubahan positif karena pelayanan menjadi lebih rapi, tertib, dengan berpedoman pada peraturan GMIT. Namun, perubahan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh sebagian besar majelis dan jemaat. Persoalannya bukan semata-mata karena jemaat menolak aturan atau pembaruan. Sebagian jemaat mengalami bahwa proses perubahan belum cukup disertai komunikasi, perkunjungan, kebersamaan, serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara memahami pelayanan. Pendeta lebih menekankan pada ketertiban organisasi, sedangkan jemaat lebih menekankan kehadiran, kedekatan, dan hubungan kekeluargaan. Bagi jemaat, pendeta bukan hanya Ketua Majelis Jemaat yang memiliki kewenangan untuk menata organisasi. Pendeta juga merupakan seorang gembala yang diharapkan hadir, mendengar, berkunjung, merangkul, dan berjalan bersama umat. Kedua pemahaman ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Gereja membutuhkan organisasi yang tertib, tetapi keteraturan tersebut perlu dibangun melalui pendekatan pastoral yang memperhatikan kehidupan nyata jemaat.

Kenyataan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan budaya dalam kepemimpinan pastoral. Pendekatan budaya berarti kesediaan seorang pendeta untuk mengenal dan memahami nilai, kebiasaan, pola komunikasi, struktur sosial, serta cara jemaat membangun kehidupan bersama. Pendekatan tersebut tidak berarti bahwa pendeta harus mengikuti semua keinginan atau kebiasaan jemaat. Pendekatan budaya juga tidak menempatkan budaya di atas Injil dan tata gereja. Sebaliknya, pemahaman terhadap budaya digunakan sebagai jembatan agar pelayanan, perubahan, dan aturan gereja dapat disampaikan melalui cara yang dapat dimengerti, diterima, dan dihidupi bersama.

Stephen Bevans mengatakan bahwa pada hakikatnya teologi Kristen perlu dipahami dari suatu konteks tertentu<sup>13</sup>. Artinya gereja tidak dapat berbicara tentang pelayanan tanpa memperhatikan pengalaman manusia, kebudayaan, lokasi sosial, sejarah, dan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Bevans menjelaskan bahwa Kitab Suci dan tradisi tetap menjadi sumber penting dalam berteologi, tetapi pengalaman manusia masa kini atau konteks juga perlu didengar dan diperhatikan<sup>14</sup>. Pemikiran tersebut penting bagi kepemimpinan pastoral karena setiap jemaat mempunyai konteks yang berbeda. Cara pelayanan yang berhasil di suatu jemaat belum tentu dapat langsung diterapkan dengan cara yang sama di jemaat lain. Aturan gereja mungkin sama, tetapi masyarakat yang menerima dan menjalankan aturan itu mempunyai sejarah, kebiasaan, pola hubungan, serta cara berkomunikasi yang berbeda. Karena itu, pendeta perlu memahami bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya secara tepat dalam konteks jemaat yang dilayani.

Jemaat Siloam Oebelo Kecil merupakan komunitas yang beragam. Warga jemaat berasal dari beberapa latar belakang etnis, dengan mayoritas berlatar belakang Rote, disertai warga Timor, Sabu, Alor, dan kelompok lainnya. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi jemaat juga beragam. Di tengah keragaman tersebut

---

<sup>13</sup> Stephens B. Bevans, *Model-Model Teologi Ko Ntekstual*, 1 (Maumere: Ledalero, 2002).

<sup>14</sup> Stephens B. Bevans, *Model-Model Teologi Ko Ntekstual*, 2-3.

terdapat nilai kekeluargaan yang kuat, penghormatan terhadap orang tua dan tokoh tertentu, serta harapan agar keputusan penting dibicarakan bersama. Selain struktur resmi gereja, terdapat pula tokoh-tokoh yang memiliki kewibawaan karena sejarah keterlibatan mereka dalam pembangunan dan perkembangan jemaat. Konteks tersebut perlu dibaca secara bijaksana oleh seorang pendeta. Kehadiran tokoh yang memiliki pengaruh tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk. Pengaruh mereka dapat menjadi kekuatan bagi pelayanan apabila diarahkan untuk mendukung kesatuan dan pertumbuhan jemaat. Namun, pengaruh tersebut juga dapat menimbulkan masalah apabila berkembang menjadi kekuasaan tidak resmi yang menghambat mekanisme pelayanan gereja. Demikian pula budaya kekeluargaan dapat memperkuat rasa saling memiliki, tetapi dapat berubah menjadi keberpihakan kepada keluarga atau kelompok tertentu. Karena itu, pendekatan budaya harus dilakukan secara terbuka sekaligus kritis.

Model antropologis yang dikembangkan Bevans menempatkan manusia dan kebudayaan sebagai unsur penting dalam proses berteologi. Model ini berusaha memahami jaringan relasi manusia serta nilai-nilai yang membentuk kehidupan suatu masyarakat. Dalam kehidupan manusia dan kebudayaannya, Allah diyakini telah hadir dan bekerja untuk menawarkan kehidupan, penyembuhan, serta keutuhan<sup>15</sup>. Oleh sebab itu, seorang pelayan tidak boleh datang ke dalam suatu konteks dengan anggapan bahwa ia membawa semua jawaban,

---

<sup>15</sup> Stephens B. Bevans, *Model-Model Teologi Ko Ntekstual*, 97-99.

sedangkan masyarakat setempat tidak memiliki sesuatu yang dapat dipelajari. Pendeta perlu datang dengan sikap rendah hati untuk mendengar, belajar, dan mengenali karya Allah yang telah berlangsung dalam kehidupan jemaat.

Menurut Bevans, seorang pelayan yang bukan berasal dari konteks tertentu tetap dapat memberikan sumbangan. Namun, ia harus menyadari keterbatasannya sebagai orang luar. Ia membawa cara berpikir, pengalaman, dan penilaiannya sendiri. Karena itu, pelayan tersebut perlu mendekati konteks dengan rendah hati, terbuka, dan bersedia terlibat secara langsung. Teologi yang kontekstual lahir melalui dialog antara orang yang melayani dengan masyarakat yang dilayaninya<sup>16</sup>. Prinsip ini sangat penting bagi seorang pendeta yang ditempatkan di jemaat baru. Pendidikan teologi dan pengetahuan terhadap tata gereja tidak otomatis membuatnya langsung memahami seluruh kehidupan jemaat.

Seorang pendeta membutuhkan waktu untuk mengenal sejarah jemaat, hubungan antarwarga, kedudukan tokoh tertentu, cara masyarakat menyampaikan persetujuan atau penolakan, serta harapan jemaat terhadap pelayanannya. Pengenalan tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan, percakapan, pertemuan informal, keterlibatan dalam kehidupan masyarakat, dan kesediaan mendengar pengalaman berbagai kelompok. Dengan cara demikian, pendeta tidak hanya

---

<sup>16</sup> Stephens B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 32-37.

mengetahui data jemaat, tetapi memahami cara hidup dan cara berpikir mereka. Hal ini bukan berarti bahwa seorang pendeta harus menunggu sampai memahami seluruh kehidupan jemaat sebelum melakukan pembaruan. Gereja tetap membutuhkan perubahan dan penataan. Akan tetapi, perubahan akan lebih mudah diterima apabila dilakukan melalui proses pengenalan, komunikasi, dan keterlibatan bersama. Pendeta tidak hanya membawa perubahan kepada jemaat, tetapi membangun perubahan bersama jemaat. Dengan demikian, jemaat tidak merasa hanya menjadi objek yang diatur, melainkan menjadi bagian dari proses pelayanan.

Dasar Alkitab yang dapat digunakan untuk merefleksikan hal ini adalah perkataan Rasul Paulus: “*Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka*” (1Kor. 9:22b). Ayat tersebut merupakan bagian dari penjelasan Paulus dalam 1 Korintus 9:19–23 mengenai penggunaan kebebasannya sebagai rasul. Paulus mengatakan bahwa sekalipun ia bebas terhadap semua orang, ia memilih menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Kepada orang Yahudi ia menjadi seperti orang Yahudi, kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat ia menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dan kepada orang yang lemah ia menjadi seperti orang yang lemah.

Ungkapan “menjadi seperti” tidak berarti bahwa Paulus kehilangan identitasnya atau menerima semua nilai dan kebiasaan orang yang dilayaninya. Paulus tetap berpegang pada Injil dan

menyatakan bahwa ia hidup di bawah hukum Kristus. Yang disesuaikan oleh Paulus bukanlah kebenaran Injil, melainkan cara ia hadir, berhubungan, dan melayani. Andi, dkk menjelaskan bahwa Paulus berusaha memahami orang lain dalam integritas Injil. Ia tidak menyesuaikan isi Injil dengan keinginan pendengar, tetapi membangun hubungan dan menempatkan dirinya secara tepat di tengah orang-orang yang dilayani<sup>17</sup>.

Sikap Paulus menunjukkan bahwa pelayanan membutuhkan keluwesan dalam pendekatan. Paulus tidak menggunakan satu cara yang sama kepada semua orang. Ia mengenali latar belakang, keadaan, dan kebutuhan kelompok yang dilayaninya. Namun, keluwesan tersebut memiliki batas yang jelas. Paulus tidak berkompromi dengan dosa dan tidak meninggalkan kebenaran. Perubahan terjadi pada metode, bukan pada moral dan isi Injil<sup>18</sup>. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kepemimpinan pastoral. Seorang pendeta perlu menyesuaikan cara berkomunikasi, memperkenalkan perubahan, memimpin rapat, dan membangun hubungan sesuai dengan konteks jemaat. Dalam masyarakat yang menekankan kekeluargaan dan musyawarah, keputusan yang benar secara organisatoris tetap perlu dijelaskan, dipercakapkan, dan dilaksanakan dengan melibatkan orang lain. Menyesuaikan pendekatan tidak berarti menyerahkan kepemimpinan

---

<sup>17</sup> Yohanes Andi, Oktavina Tola, Yabes Doma, dan I Ketut Gede Suparta, "Strategi Misi Lintas Budaya Berdasarkan 1 Korintus 9:19–23," *Urnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.46445/jtki.v1i1.249>.

<sup>18</sup> Yohanes Andi, Oktavina Tola, Yabes Doma, dan I Ketut Gede Suparta, "Strategi Misi Lintas Budaya Berdasarkan 1 Korintus 9:19–23", 60-62.

kepada tekanan tokoh atau kelompok tertentu. Pendeta tetap harus setia kepada Injil, kode etik, dan tata gereja. Namun, kesetiaan terhadap aturan tidak boleh membuatnya mengabaikan manusia yang akan menjalankan aturan tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap 1 Korintus 9:19–23, pelayanan lintas budaya Paulus ditandai oleh sikap tidak eksklusif, tidak egois, dan tidak membedakan orang berdasarkan latar belakang atau status sosial<sup>19</sup>. Ketiga sikap tersebut juga penting dalam kepemimpinan pastoral. Pendeta tidak boleh menutup diri di pastori atau hanya berhubungan dengan kelompok yang dianggap mudah menerima kepemimpinannya. Ia perlu membuka ruang perjumpaan dengan seluruh jemaat. Pendeta juga tidak boleh menjadikan kedudukan dan kewenangannya sebagai pusat pelayanan. Otoritas harus digunakan untuk kepentingan umat. Selain itu, pendekatan budaya tidak boleh hanya diarahkan kepada tokoh berpengaruh. Kaum muda, perempuan, keluarga sederhana, orang berpendidikan rendah, dan kelompok yang kurang terdengar juga perlu diperhatikan. Pendekatan Paulus memperlihatkan bahwa seorang pelayan harus terlebih dahulu bersedia masuk ke dalam kehidupan orang yang dilayani. Ia mendengar, memahami, dan menempatkan diri tanpa kehilangan identitas serta panggilannya. Dalam konteks Jemaat Siloam Oebelo Kecil, prinsip ini menunjukkan pentingnya perkunjungan dan percakapan pastoral.

---

<sup>19</sup> Yohanes Andi, Oktavina Tola, Yabes Doma, dan I Ketut Gede Suparta, “Strategi Misi Lintas Budaya Berdasarkan 1 Korintus 9:19–23”, 60-64.

Perkunjungan bukan sekadar kegiatan tambahan, tetapi sarana bagi pendeta untuk mengenal keadaan, bahasa, pergumulan, serta cara berpikir jemaat. Melalui perjumpaan tersebut, kepercayaan dapat dibangun dan perubahan lebih mudah dipahami.

Pendekatan budaya dalam kepemimpinan pastoral perlu berjalan bersama dengan kepemimpinan hamba atau *servant leadership*. Pendekatan budaya menolong pendeta memahami siapa yang dilayani, sedangkan kepemimpinan hamba menunjukkan bagaimana pendeta harus hadir di tengah mereka. Tanpa semangat melayani, pemahaman budaya dapat berubah menjadi strategi untuk memperoleh dukungan atau mempertahankan kedudukan. Sebaliknya, kepemimpinan hamba tanpa pemahaman budaya dapat menghasilkan pelayanan yang bermaksud baik, tetapi tidak menyentuh kebutuhan nyata jemaat.

Yohanes Parapat menjelaskan bahwa *servant leadership* tidak seharusnya hanya dipahami sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang digunakan pada keadaan tertentu. Dalam organisasi Kristen, melayani merupakan ciri utama yang harus selalu tampak dalam diri seorang pemimpin. Karakter tersebut terlihat melalui sikap tidak mementingkan diri sendiri, kerendahan hati, pemberdayaan, integritas, dan kesediaan menjadi teladan<sup>20</sup>. Dasar kepemimpinan tersebut adalah Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.

---

<sup>20</sup> Yohanes Parapat, "Servant Leadership Dalam Organisasi Kristen: Antara Gaya Kepemimpinan Dan Ciri Utama," 2021., 149-150.

Kepemimpinan hamba bukan berarti pemimpin tidak boleh menggunakan kewenangan atau mengambil keputusan. Pemimpin tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, mengatur, dan bertindak tegas ketika dibutuhkan. Namun, kewenangan itu tidak digunakan untuk mempertahankan kedudukan atau menunjukkan superioritas. Kewenangan dipakai untuk menjaga kehidupan bersama dan membangun orang-orang yang dipimpin. Parapat menegaskan bahwa kepemimpinan hamba bertujuan memberdayakan orang, bukan membuat mereka hanya berfungsi sebagai pendukung pemimpin atau organisasi<sup>21</sup>. Prinsip tersebut memiliki hubungan langsung dengan hasil penelitian. Upaya pendeta menata organisasi, administrasi, dan keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Namun, kepemimpinan hamba menuntut agar penataan tersebut juga memberi ruang bagi majelis dan jemaat untuk belajar, terlibat, serta berkembang. Pendeta tidak hanya mengerjakan sesuatu karena merasa lebih memahami aturan, tetapi membimbing orang lain agar bersama-sama memahami alasan dan tujuan dari perubahan tersebut.

Kepemimpinan hamba juga menolong pendeta memandang kritik bukan semata-mata sebagai perlawanan terhadap kewibawaannya. Kritik dapat menjadi kesempatan untuk mendengar pengalaman orang lain dan mengevaluasi pelayanan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap kritik selalu benar. Kritik tetap perlu diperiksa secara adil dan

---

<sup>21</sup> Yohanes Parapat, "Servant Leadership Dalam Organisasi Kristen: Antara Gaya Kepemimpinan Dan Ciri Utama," *Jurnal Teologi Praktika* 2, no. 2 (2021), 150-151.

bertanggung jawab. Namun, pemimpin yang rendah hati tidak langsung menolak suara yang berbeda. Ia berusaha memahami apa yang berada di balik kritik tersebut. Dalam kasus Jemaat Siloam Oebelo Kecil, surat dan keluhan jemaat seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi percakapan pastoral. Sekalipun cara penyampaian kritik mungkin dianggap tidak sesuai dengan mekanisme, isi keluhan tetap perlu didengar. Pendekatan budaya dan kepemimpinan hamba menolong gereja membedakan antara cara penyampaian yang kurang tepat dengan kebutuhan nyata yang sedang disuarakan. Dengan demikian, aturan tidak dipakai untuk menutup percakapan, tetapi menjadi pagar agar percakapan berlangsung dengan tertib dan adil.

Meskipun demikian, budaya tidak boleh diterima tanpa penilaian kritis. Bevans mengingatkan bahwa salah satu kelemahan model antropologis adalah kecenderungannya meromantiskan budaya, seolah-olah semua yang berasal dari budaya lokal pasti baik dan benar<sup>22</sup>. Budaya juga dapat mengandung kepentingan, ketidakadilan, dominasi, dan kebiasaan yang merugikan kelompok tertentu. Karena itu, nilai budaya perlu diperiksa dalam terang Kitab Suci, tradisi iman, dan tujuan pelayanan gereja.

Dalam konteks Jemaat Siloam Oebelo Kecil, nilai kekeluargaan, kebersamaan, penghormatan, dan musyawarah dapat menjadi kekuatan pelayanan. Nilai-nilai tersebut dapat membantu pendeta membangun

---

<sup>22</sup> Stephens B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, 106-110.

hubungan, menyelesaikan konflik, dan melibatkan jemaat. Namun, unsur budaya yang menghasilkan dominasi tokoh, keberpihakan keluarga, penolakan terhadap koreksi, atau campur tangan di luar batas kewenangan harus dikritisi. Pendekatan budaya yang benar tidak membiarkan budaya menguasai gereja, tetapi memperjumpakan budaya dengan nilai Injil agar mengalami pembaruan. Karena itu, kepemimpinan pastoral yang peka budaya memerlukan dua sikap sekaligus. Pertama, kerendahan hati untuk mendengar dan belajar dari jemaat. Kedua, keberanian etis untuk menilai serta mengoreksi unsur budaya yang tidak sesuai dengan kasih, keadilan, kesetaraan, dan kehidupan bersama. Pendeta tidak boleh datang sebagai penguasa yang menolak seluruh kebiasaan lokal. Namun, pendeta juga tidak boleh menjadi pemimpin yang hanya mengikuti keinginan masyarakat demi memperoleh penerimaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kode Etik Pendeta GMIT tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan terhadap aturan, karakter pribadi, dan dukungan organisasi. Implementasi kode etik juga membutuhkan kepekaan serta pendekatan terhadap budaya lokal yang ada. Kepekaan budaya berarti kemampuan untuk membaca konteks, mengenal orang yang dilayani, memahami struktur formal dan informal, menyesuaikan cara berkomunikasi, serta melaksanakan perubahan melalui dialog dan partisipasi. Pemimpin gerejawi yang etis harus pula menjadi pemimpin yang peka. Tidak cukup bagi seorang pendeta hanya mengetahui apa yang benar menurut

aturan. Ia juga perlu memiliki kebijaksanaan untuk menerapkan kebenaran tersebut melalui cara yang tepat dalam kehidupan jemaat. Dengan demikian, aturan gereja tidak dirasakan sebagai kuasa dari luar yang memaksa, tetapi sebagai pedoman yang dipahami dan dihidupi bersama.

Pendekatan budaya dalam kepemimpinan pastoral bukanlah usaha melemahkan otoritas pendeta. Justru pendekatan tersebut menolong pendeta menggunakan otoritas secara lebih bertanggung jawab. Pendeta yang mengenal konteks jemaat akan lebih mampu menentukan kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, kapan harus bertindak tegas, dan kapan harus memberi ruang bagi orang lain. Ia tidak kehilangan wibawa ketika melibatkan jemaat. Sebaliknya, wibawa pastoral bertumbuh ketika jemaat melihat bahwa keputusan diambil dengan pengetahuan, kejujuran, kasih, dan penghargaan terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, pendekatan budaya mengajak pendeta untuk hadir bukan hanya sebagai pemimpin organisasi, tetapi sebagai gembala yang tinggal dan berjalan bersama umat. Ia tetap setia kepada Injil, kode etik, dan tata gereja, tetapi menyampaikan serta menjalankannya melalui bahasa dan pola hubungan yang dapat dipahami oleh jemaat. Kepemimpinan seperti inilah yang dapat membangun keteraturan tanpa kehilangan relasi, melakukan perubahan tanpa menciptakan keterasingan, serta menggunakan otoritas bukan untuk menguasai, melainkan untuk melayani dan memberdayakan tubuh Kristus.

## 5.2 Penutup

### 5.2.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “**Implementasi Kode Etik Pendeta GMIT: Tinjauan Etika Pastoral terhadap Otoritas Pendeta di GMIT Jemaat Siloam Oebelo Kecil serta Dampaknya bagi Integritas Lembaga Gereja,**” maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Pendeta GMIT merupakan pedoman moral dan teologis yang penting bagi kehidupan serta pelayanan pendeta. Namun, keberadaan kode etik sebagai dokumen resmi gereja belum dengan sendirinya menjamin bahwa nilai-nilai di dalamnya dapat diterapkan secara baik dalam pelayanan. Implementasi kode etik membutuhkan pemahaman, pembentukan karakter, pendampingan, pengawasan, dan kerja sama seluruh unsur gereja.

*Pertama*, pemahaman para pemangku kepentingan terhadap Kode Etik Pendeta GMIT masih beragam. Pendeta lebih memahami kode etik secara normatif sebagai aturan yang mengarahkan tugas, tanggung jawab, dan batas pelayanan. Sebaliknya, sebagian besar majelis dan jemaat belum mengetahui isi kode etik secara formal. Mereka memahami etika pendeta melalui pengalaman langsung, terutama dari keteladanan, perkunjungan, kepedulian, komunikasi, dan hubungan pendeta dengan jemaat. Pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat juga menilai kehidupan etis pendeta melalui keteladanan serta kemampuannya membangun hubungan sosial. Keragaman ini

menunjukkan bahwa sosialisasi kode etik belum dilakukan secara luas dan berkelanjutan.

*Kedua*, implementasi kode etik di Jemaat Siloam Oebelo Kecil memperlihatkan adanya usaha positif dari pendeta dalam menata organisasi, administrasi, persidangan jemaat, dan pengelolaan pelayanan agar lebih tertib sesuai aturan GMT. Namun, penataan tersebut belum berjalan seimbang dengan pendekatan pastoral yang menekankan komunikasi, perkunjungan, keterlibatan, dan hubungan kekeluargaan. Karena itu, sebagian keputusan pendeta dipahami oleh majelis dan jemaat sebagai tindakan yang terlalu dominan. Persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena pendeta tidak menjalankan tanggung jawab, tetapi karena cara menjalankan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya memperhatikan konteks sosial dan budaya jemaat.

*Ketiga*, dalam perspektif etika pastoral Richard M. Gula, otoritas pendeta merupakan kepercayaan dari Allah dan gereja yang harus dipakai untuk melayani, membangun, menyembuhkan, dan memberdayakan umat. Otoritas tidak boleh dipakai untuk menguasai, menekan, atau mempertahankan kepentingan pribadi. Dalam kasus Jemaat Siloam Oebelo Kecil, persoalan penggunaan otoritas tidak dapat dibebankan hanya kepada pendeta. Konflik juga dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi, kurangnya pemahaman majelis dan jemaat terhadap aturan gereja, kuatnya pengaruh tokoh tertentu, hubungan

kekeluargaan, serta belum maksimalnya pendampingan dari gereja sebagai lembaga.

*Keempat*, dinamika pelayanan tersebut berdampak pada hubungan antara pendeta, majelis, dan jemaat. Dampaknya terlihat melalui munculnya kekecewaan, terganggunya persekutuan, menurunnya rasa percaya, serta melemahnya wibawa pelayanan gereja. Hal ini menunjukkan bahwa integritas pendeta berhubungan erat dengan integritas gereja. Ketika perkataan, keputusan, dan tindakan pelayan gereja tidak dipahami sebagai wujud kasih dan tanggung jawab pastoral, kepercayaan jemaat terhadap gereja juga ikut mengalami gangguan.

*Kelima*, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dilakukan melalui keputusan administratif, penarikan, atau mutasi pendeta. Keputusan tersebut dapat menghentikan ketegangan, tetapi belum tentu menyembuhkan luka dan memulihkan hubungan. Gereja perlu menyediakan ruang bagi semua pihak untuk saling mendengar, menjelaskan persoalan, mengakui kesalahan, mengampuni, dan membangun kembali kepercayaan. Klasik dan sinode dipanggil bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai gembala yang mendampingi serta memulihkan.

Dengan demikian, implementasi Kode Etik Pendeta GMIT perlu bergerak dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menuju budaya etis dalam pelayanan gereja. Budaya etis dibangun ketika pendeta, majelis,

jemaat, klasis, dan sinode bersama-sama menghidupi kasih, keadilan, kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kesediaan menerima koreksi. Pendeta perlu memadukan keteraturan organisasi dengan pendekatan pastoral yang peka terhadap budaya jemaat. Sebaliknya, jemaat juga perlu memahami tugas dan kewenangan pendeta serta menyampaikan kritik melalui cara yang bertanggung jawab.

Akhirnya, gereja yang berintegritas bukanlah gereja yang tidak pernah mengalami persoalan. Gereja yang berintegritas adalah gereja yang berani menghadapi persoalan secara jujur, adil, terbuka, dan memulihkan. Melalui pembinaan etika pastoral, sosialisasi kode etik, pendampingan yang berkelanjutan, kepemimpinan yang melayani, serta kerja sama seluruh tubuh Kristus, Kode Etik Pendeta GMIT dapat benar-benar menjadi pedoman yang membangun pelayanan yang bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan jemaat terhadap gereja.

### **5.2.2 Saran**

#### **1) Bagi Majelis Sinode GMIT**

Majelis Sinode GMIT perlu memperkuat penerapan Kode Etik Pendeta GMIT melalui sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi yang dilakukan secara teratur. Kode etik tidak seharusnya hanya dibicarakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi perlu menjadi bagian dari pembinaan pendeta sejak masa pendidikan, penahbisan, penempatan, dan selama menjalankan pelayanan.

Majelis Sinode juga perlu menyediakan pelatihan etika pastoral yang membahas penggunaan otoritas, komunikasi, pengelolaan konflik, batas-batas relasi pastoral, kepemimpinan hamba, dan kepekaan terhadap budaya jemaat. Selain itu, mekanisme pengaduan, pemeriksaan, pendampingan, dan penegakan disiplin perlu dijalankan secara terbuka, adil, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan persoalan. Ketika terjadi konflik, keputusan administratif seperti penarikan atau mutasi pendeta perlu disertai proses pastoral. Sinode perlu memastikan adanya mediasi, pembinaan, evaluasi, dan pemulihan relasi agar pendeta maupun jemaat tidak meninggalkan persoalan dengan membawa luka yang belum diselesaikan.

## 2) Bagi Majelis Klasis

Majelis Klasis perlu meningkatkan fungsi pendampingan dan pengawasan terhadap pelayanan pendeta di jemaat. Pendampingan tidak hanya dilakukan setelah konflik menjadi besar, tetapi sejak awal penempatan pendeta melalui komunikasi rutin, kunjungan pelayanan, evaluasi berkala, dan ruang konsultasi.

Klasis juga perlu menjadi penghubung antara pendeta, majelis jemaat, dan warga jemaat ketika mulai muncul ketegangan. Setiap keluhan perlu didengar dan diperiksa secara seimbang. Klasis tidak hanya bertugas menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi membantu para pihak memahami akar masalah dan menemukan jalan

penyelesaian yang adil serta memulihkan. Selain itu, klasis perlu menolong pendeta memahami konteks sosial dan budaya jemaat tempatnya melayani. Pengenalan terhadap sejarah jemaat, tokoh-tokoh yang berpengaruh, hubungan kekeluargaan, pola komunikasi, dan harapan warga jemaat dapat membantu pendeta menjalankan kepemimpinan secara lebih bijaksana.

### 3) Bagi Pendeta

Pendeta GMIT perlu memahami dan menghidupi kode etik bukan hanya sebagai aturan organisasi, tetapi sebagai pedoman moral dan spiritual dalam menjalankan panggilan. Otoritas yang dimiliki pendeta harus dipakai untuk melayani, membangun, melindungi, dan memberdayakan jemaat, bukan untuk mengendalikan atau mempertahankan kedudukan.

Dalam memimpin jemaat, pendeta perlu menjaga keseimbangan antara penataan organisasi dan pendekatan pastoral. Administrasi, keuangan, pembangunan, dan tata pelayanan tetap penting, tetapi pelaksanaannya perlu disertai komunikasi, perkunjungan, sosialisasi, dialog, dan keterlibatan majelis serta jemaat. Pendeta juga perlu memiliki kerendahan hati untuk menerima kritik dan mengevaluasi diri. Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap kepemimpinan. Kritik dapat menjadi kesempatan untuk mengetahui kebutuhan dan pengalaman jemaat. Meskipun cara penyampaian kritik mungkin kurang tepat, isi yang disampaikan tetap perlu didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, pendeta perlu mengembangkan kepekaan

budaya. Pendeta harus mengenal kebiasaan, nilai, struktur sosial, dan pola hubungan dalam jemaat. Namun, kepekaan budaya tidak berarti mengikuti semua keinginan masyarakat. Nilai budaya yang mendukung kasih, musyawarah, kebersamaan, dan penghormatan perlu dipelihara, sedangkan nilai yang menimbulkan dominasi, keberpihakan, dan ketidakadilan perlu dikoreksi dalam terang Injil.

#### 4) . Bagi Majelis Jemaat

Majelis jemaat perlu memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai Kode Etik Pendeta GMIT, tugas pendeta, batas kewenangan pendeta, dan tata pelayanan GMIT. Pemahaman tersebut penting agar majelis dapat bekerja sama dengan pendeta secara seimbang dan tidak menilai pelayanan hanya berdasarkan harapan pribadi atau kebiasaan lama. Majelis perlu menjalankan fungsinya sebagai rekan pelayanan, bukan hanya sebagai pelaksana keputusan pendeta atau sebagai kelompok yang selalu menolak perubahan. Majelis harus berani memberikan masukan, tetapi melakukannya dengan cara yang benar, terbuka, dan bertanggung jawab. Setiap keputusan yang berhubungan dengan kehidupan jemaat perlu dibicarakan secara bersama. Majelis juga harus menjaga agar hubungan keluarga, kedekatan sosial, dan pengaruh tokoh tertentu tidak menguasai proses pengambilan keputusan dalam gereja.

#### 5) Bagi Jemaat

Warga jemaat perlu memahami bahwa pendeta adalah pelayan Allah yang memiliki tanggung jawab besar, tetapi tetap manusia yang

memiliki keterbatasan. Karena itu, jemaat tidak hanya menuntut pendeta memenuhi semua harapan, tetapi juga memberikan dukungan, doa, kerja sama, dan kritik yang membangun. Apabila terjadi persoalan, jemaat perlu menyampaikannya melalui mekanisme gerejawi yang tersedia. Kritik hendaknya disampaikan secara jujur, terbuka, dan tidak melalui gosip, tekanan kelompok, atau serangan pribadi. Tujuan kritik bukan mempermalukan atau menjatuhkan pendeta, tetapi memperbaiki pelayanan dan menjaga kehidupan bersama. Jemaat juga perlu terlibat aktif dalam pelayanan. Pelayanan gereja bukan hanya tugas pendeta. Setiap anggota adalah bagian dari tubuh Kristus yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga persekutuan, membangun kedamaian, dan mendukung pertumbuhan gereja.